
Faktor Yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* Pada *Website* Pemerintah Daerah di Indonesia

A Winangsih¹, Rigel Nurul Fathah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: a.winabira@gmail.com¹, rigelnurul@unisayogya.ac.id²

Article History:

Received: 14 Juni 2023

Revised: 20 Juni 2023

Accepted: 22 Juni 2023

Keywords: *internet financial reporting*, belanja daerah, jumlah penduduk, opini audit, kekayaan daerah.

Abstract: *Transparansi sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah, sehingga dapat menghindari terjadinya asimetri informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, jumlah penduduk, opini audit, dan kekayaan daerah terhadap internet financial reporting pada website pemerintah daerah di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah 514 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap internet financial reporting pada website pemerintah di Indonesia., sedangkan opini audit dan kekayaan daerah berpengaruh terhadap internet financial reporting pada website pemerintah di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, pengguna teknologi komputer dan jaringan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan publik. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era saat ini memungkinkan entitas yang berbeda berinteraksi dengan stakeholdernya lebih kuat (Barokah, S & FS, Segarawasesa, 2023). Hal ini merupakan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good government governance* di Indonesia oleh banyak pihak. (M, Rifandi, 2018). Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan (M, Rifandi, 2018). Meningkatnya kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan jasa akuntansi forensik (Urusah, D; Aji, 2017). Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat

dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya (Mulyati, E; M, Rifandi; Anam, C, 2023).

Menurut CNBC Indonesia, jumlah masyarakat Indonesia yang terhubung ke internet terus bertambah, bahkan kini internet menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 171,17 juta jiwa dari total penduduk Indonesia keseluruhan yaitu 264,16 jiwa. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan, salah satunya adalah informasi keuangan pada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hal tersebut mendukung Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui internet. Instruksi tersebut mewajibkan agar Pemerintah Daerah mempublikasikan 12 dokumen antara lain: (1) Ringkasan RKA SKPD, (2) Ringkasan RKP PPKD, (3) Rancangan Perda APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Ringkasan DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, Berisi deskripsi tentang latar belakang 9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) Opini BPK atas LKPD dalam pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat di dalam situs resminya. Laporan keuangan yang baik berguna bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan sebuah keputusan (Alqurni, P; AD, Nindiasari, 2022).

Perhatian terhadap transparansi dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggungjawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyajikan informasi dengan cara yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mempublikasikan informasi keuangan pada *website* resmi masing - masing daerah. Penyampaian informasi keuangan daerah melalui internet merupakan cara yang ekonomis, efektif, dan efisien bagi lembaga pemerintah daerah untuk menyebarkan dan menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Praktik *Internet Financial Reporting* sebagai salah satu perwujudan dari *e-government* terus dikembangkan di Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan integrasi dan efisiensi manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat dan sebagai upaya menciptakan *good and clean governance*.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul dengan cara salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Penerapannya pada bidang sektor publik yaitu masyarakat dikatakan sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Dimana masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah

untuk kesejahteraannya dan pemerintah wajib melaporkan pengelolannya sebagai wujud dari pertanggungjawaban. Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu untuk mengurangi adanya asimetri informasi yang dapat menyebabkan suatu pertentangan antara pemerintah dengan masyarakat.

2. Teori Legitimasi

Pelaporan keuangan di internet secara sukarela merupakan suatu bentuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang mengandung nilai akuntabilitas serta merupakan wujud transparansi atas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Dengan memenuhi harapan masyarakat, aktivitas dan kinerja pemerintah daerah dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena telah diketahui bahwa pemenuhan harapan masyarakat berdampak baik terhadap organisasi, pemerintah daerah akan cenderung untuk melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

3. Ayat Al-Qur'an yang Relevan

Q.S An-Nisa ayat 58 menerangkan bahwasannya apabila kita memimpin maka kita harus menyampaikan amanah kepada pemiliknya dan apabila akan memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menyampaikan amanah kepada yang berhak, salah satunya yaitu masyarakat.

Q.S Al-Muttaffin ayat 1 sampai 7 menjelaskan bahwasannya kita dilarang untuk berbuat curang dalam melakukan takaran dan timbangan terhadap apapun itu. Hal tersebut relevan dengan penelitian ini yaitu dalam pemberian informasi kepada publik mengenai segala aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, haruslah informasi tersebut diungkapkan dengan seluas-luasnya supaya tidak terjadi asimetri informasi.

4. Internet Financial Reporting

Internet Financial Reporting adalah suatu cara yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu melalui *website* yang dimiliki masing

– masing pemerintah daerah. Menurut *Government Finances Officer Association* (2009) ada beberapa manfaat dari mempublikasikan informasi keuangan pada situs resmi Pemerintah Daerah seperti; Meningkatkan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap para pengguna informasi keuangan; Keteraksesan universal bagi seluruh pengguna informasi keuangan; Meningkatkan interaksi dengan pengguna informasi keuangan; Meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya; dan Mengurangi penggunaan kertas yang berkelanjutan.

5. Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Di samping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

6. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sekumpulan individu yang menempati suatu daerah sesuai dengan ketentuan hukum. Jumlah penduduk yang banyak mengindikasikan bahwa pemerintah harus melaporkan informasi keuangan secara lebih luas, sehingga dalam hal ini pelaporan informasi keuangan merupakan cara yang ekonomis, efektif, dan efisien untuk daerah yang mempunyai

jumlah penduduk yang banyak.

7. Opini Audit

Opini audit merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintahan. Anggapannya bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini yang baik maka akan semakin tinggi dalam melakukan pengungkapan informasi keuangannya.

8. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkat kekayaan daerah yang tinggi dan pengelolaan keuangan yang baik.

Hipotesa

H₁ : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah.

H₂ : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah.

H₃ : Opini audit berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah.

H₄ : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah..

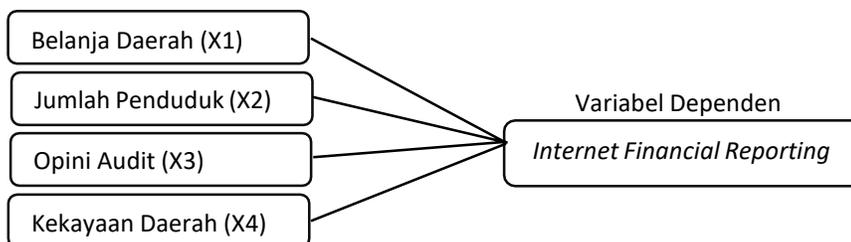
METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan hubungan belanja daerah, jumlah penduduk, opini audit dan kekayaan daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah.

b. Variabel Penelitian

Variabel Independen



c. Pengukuran Variabel

Tabel 1. Pengukuran Variabel Sumber tabel: data diolah, 2020

<i>Internet Financial Reporting</i> (Y)	Menggunakan indeks aksesibilitas IFR yang dikembangkan oleh (Styles & Tennyson, 2007) dengan disesuaikan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012. Jika sesuai syarat ditambahkan sesuai skor, jika tidak memenuhi diberikan 0.
Belanja Daerah (X1)	Ln Total Belanja Daerah
Jumlah Penduduk (X2)	Log Jumlah penduduk daerah

Opini Audit (X3)	Angka 1 untuk Pemda yang mendapat opini audit WTP dan angka 0 untuk Pemda yang mendapat opini audit non WTP
Kekayaan Daerah (X4)	Total PAD/Jumlah Penduduk

d. Jenis, Sumber, Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder melalui metode dokumentasi. Variabel dependen dalam penelitian ini diperoleh melalui alamat *website* pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, variabel independen dilakukan melalui catatan atau basis data *softcopy* pada *website* berbagai sumber terkait, yaitu data belanja daerah dan kekayaan daerah yaitu laporan realisasi anggaran kabupaten/kota yang diperoleh melalui *website* resmi masing-masing daerah. Data mengenai opini audit atas LKPD diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (www.bpk.go.id). Data mengenai jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik RI (www.bps.go.id).

e. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514 pemerintah daerah (416 Kabupaten dan 98 Kota). Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, yaitu: (1) Pemerintah daerah memiliki *website* yang dapat diakses dengan domain go.id. (2) *Website* pemerintah daerah menyediakan Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit oleh BPK RI tahun anggaran 2017/2018. (3) Pemerintah daerah yang menyediakan seluruh data-data statistik yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian.

f. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi deskriptif dari perhitungan nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan nilai rata-rata (*mean*). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku dan distribusi suatu data sampel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dengan membandingkan p value dengan tingkat signifikansi 5%. Jika p Value > 5%, maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *Tolerance* yang rendah akan sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Jika nilai *Tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka tidak terjadi problem multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik yaitu apabila data memiliki varian yang sama (homokedastisitas) atau tidak memiliki varian yang berbeda (heteroskedastisitas). Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menguji adanya gejala heterokedastisitas adalah uji scatterplot (Ghozali, 2011).

d. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Menurut Ghozali (2011), salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut, dapat menggunakan uji Durbin Watson dan uji *Cochrane Orcutt*. Uji Durbin Watson dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dengan membandingkan nilai DW terhadap batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Jika nilai DW berada diantara dL dan dU atau diantara dU dan 4-dL atau

diantara 4-dU dan dL-4, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2011).

3. Uji Analisis Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda diinterpretasikan sebagai berikut:

$$IIFR = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

IIFR : Indeks *Internet Financial Reporting*

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi X1 : Belanja Daerah

X2 : Jumlah Penduduk X3 : Opini Audit

X4 : Kekayaan Daerah

e : kesalahan pengganggu

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Menurut Ghozali (2011) uji t (parsial) adalah pengujian koefisien regresi pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Bila nilai signifikan < nilai alpha (5%), berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh variabel independen, maka R² pasti mengikat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, untuk jumlah variabel independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R²) (Ghozali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisis dalam pengambilan sampel, sebanyak 16 website kabupaten/kota dengan domain go.id tidak dapat diakses selama proses pengambilan data dan sebanyak 468 yang tidak melampirkan laporan realisasi anggaran tahun 2017/2018. Sehingga secara keseluruhan sampel yang menjadi objek penelitian berjumlah 30 kabupaten/Kota, karena penelitian dilakukan pada tahun 2017/2018, jadi jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 60 data (30 x 2).

1. Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sumber tabel: data diolah spss, 2020

Model	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	60	27,133	29,136	28,098	0,472
Jumlah Penduduk	60	4,720	6,668	5,667	0,475
Opini Audit	60	0,000	1,000	0,933	0,252
Kekayaan Daerah	60	26779,310	431568694,967	11632714,273	61897196,023
IFR	60	0,130	0,900	0,441	0,198

Sumber tabel: data diolah spss, 2020

2. Analisis Regresi Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi

Sumber tabel: data diolah spss, 2020

Model		Coefficients ^a		
		Unstandardized		
		Coefficients		
		B		
t	(Constant)	-0,736	-0,690	0,493
	Belanja Daerah	0,041	0,559	0,579
	Jumlah Penduduk	0,066	0,946	0,348
	Opini Audit	0,177	2,138	0,037
	Kekayaan Daerah	0,000	-2,035	0,047

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $IFR = (0,736) + 0,041 X_1 + 0,066 X_2 + 0,177 X_3 + 0,000 X_4 + e$

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Variabel belanja daerah memperoleh nilai t hitung sebesar 0,559 dan nilai Sig. sebesar 0,579. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel 2,004 dan nilai Sig. lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak.

Variabel jumlah penduduk memperoleh nilai t hitung sebesar 0,946 dengan nilai Sig. sebesar 0,348. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel 2,004 dan nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak.

Variabel opini audit memperoleh nilai t hitung sebesar 2,138 dengan nilai Sig. sebesar 0,037. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 2,004 dan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H₃ diterima.

Variabel kekayaan daerah memperoleh nilai t hitung sebesar -2,035 dengan nilai Sig. sebesar 0,047. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 2,004 dan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H₄ diterima.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Sumber tabel: data diolah spss, 2020

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
Estimate1	,475 ^a	0,226	0,169	0,17012

Besarnya adjusted R Square adalah sebesar 0,226 atau 22,6%, hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen dalam penelitian ini yaitu belanja daerah, jumlah penduduk, opini audit, dan kekayaan daerah terhadap variabel dependen yaitu *internet financial reporting* adalah sebesar 22,6% dan 77,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Belanja Daerah

Hasil analisis statistik yang telah dilakukan yaitu menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,041 dan nilai signifikansi sebesar 0,579. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Sehingga, hipotesis pertama yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil statistik penelitian, atau **H1 ditolak**. Jadi, dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh antara belanja daerah dengan *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2017) dan Rozi (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja daerah dan *internet financial reporting* pada pemerintah daerah. Hal ini terjadi diduga karena masih banyaknya pemerintah daerah yang bersikap abai terhadap pengungkapan informasi keuangan daerahnya.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil dari analisis statistik yang telah dilakukan menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,066 dan nilai signifikansi sebesar 0,348. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Sehingga, hipotesis kedua yang telah diajukan tidak sesuai dengan hasil statistik oleh penelitian, atau **H2 ditolak**. Jadi, dapat diartikan bahwa jumlah penduduk tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kholifah (2019) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting*.

3. Opini Audit

Berdasarkan hasil dari analisis statistik yang telah dilakukan menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,177 dan nilai signifikansi sebesar 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Sehingga, hipotesis ketiga yang telah diajukan sesuai dengan hasil statistik, atau **H3 diterima**. Jadi, dapat diartikan bahwa opini audit mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting*.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahim & Martani (2016) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki hubungan positif terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Opini audit yang bagus semakin mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan pada *website* resminya.

4. Kekayaan Daerah

Hasil analisis statistik yang telah dilakukan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,047. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Sehingga, hipotesis keempat yang telah diajukan sesuai dengan hasil statistik oleh penelitian, atau **H4 diterima**. Jadi, dapat diartikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap praktik *internet financial reporting*. Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah membuat pemerintah daerah terdorong untuk melakukan praktik *internet financial reporting*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2016) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap *internet financial reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah mampu mempengaruhi tingkat

pengungkapan *internet financial reporting* pada *website* resmi pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti tingginya tingkat belanja daerah di suatu daerah tidak menjamin pemerintah daerahnya melakukan *internet financial reporting* pada *website* resmi.
2. Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti sedikit atau banyaknya jumlah penduduk yang ada pada kabupaten/kota tersebut tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pada *website* resmi.
3. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti opini audit yang bagus yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mendorong pemerintah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* pada *website* resmi.
4. Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti dengan tingginya kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah tersebut mendorong untuk melakukan praktik *internet financial reporting* pada *website* resmi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang sampel yang digunakan, supaya dapat menggambarkan kondisi pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan pada *website* resmi untuk jangka waktu yang panjang.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dianggap mampu mempengaruhi *internet financial reporting* pada *website* pemerintah daerah, seperti kompetisi politik, jumlah pegawai yang mengurus *website* resmi pemerintah daerah, dan jumlah SKPD.

PENGAKUAN

Terimakasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang telah mendukung proses penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu proses pengambilan data penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Barokah, S; FS Segarawasesa. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Studi pada RSUD di Pulau Jawa Periode 2019-2020). Jurnal Tambora Vol 7 (1). 282-290.

- M, Rifandi. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Bilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Relasi*. Vol 14 (2). 48-61.
- M. Rifandi. (2018). Pengaruh Pengalaman Kerja dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit Pada Pemerintah D.I Yogyakarta. Vol 9 (2). 19-26.
- Mulyati, E; M, Rifandi; Anam, C. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Vol 2 (7). *Jurnal Ulil Albab*. 3004-3012.
- Alqurni, P; AD, Nindiasari. (2022). Kinerja Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk, Ditinjau Berdasar Analisis Rasio Profitabilitas. Vol 11 (1). 259-265.
- Urumsah, D; SSB, Aji. 2017. Factors Affecting The Use Of Forensic Accounting Services an Emprical Study on Indonesian Banks. *Asia Pasific Fraud Journal*. 147-163.
- Al-Quran. Surat Al-Muttaffifin ayat 1 sampai 7. Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 58.
- Alhajjriana et al., 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Vol. 17 No. 2.
- Franedy, Roy. 2019. Survei Pengguna Internet di RI Tembus 171,17 Juta Jiwa. (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei-pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa>), diakses pada 16 November 2019.
- Government Finance Officers Association. (2009). Presenting official financial documents on your government's website. GFOA. Chicago.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 303-360.
- Junaedi. 2015. Pengaruh Kekayaan Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Kompleksitas, Tipe Pemerintah Daerah, Kualitas Audit dan Tingkat Penyimpangan Anggaran Terhadap Pengungkapan *Based Financial Reporting*. *Jurnal Sainstech Politeknik Surakarta* Vol. 2 No. 4. ISSN 2355—5009.
- Nosihana dan Yaya. 2016. *Internet Financial Reporting* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya PadaPemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi (JDAB)* Vol. 3 No. 2.
- Prabowo, Daniel Wicaksono Adhi. 2016. Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd114) Melalui Internet (Iflgr) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi*. (Online), Vol. XVI No. 1.
- Rahim, W. M., & Martani, D. 2016. Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan *Website* Pemerintah Daerah. *Konferensi Regional Akuntansi III, Jember*, April 2016.
- Rozi, Fakhru. 2018. Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam *Website* Pemerintah Daerah. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Setyowati, Isthika, dan Pratiwi. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja* Vol. 20 No. 2. Trisnawati, M,D., & Achmad, K., 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet. *Simpodium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram. Lombok.
- Wilopo, Indra Agung. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui *Website*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. VII No. 1 J6

Peraturan – Peraturan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri No. 188/1797/SJ. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.